

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai atau pun yang berasal dari luar individu pegawai. bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. faktor – faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, Kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan nonfisik, kepemimpinan, komunikasi vertikal dan horizontal, kompensasi, control berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem hukuman dan sebagainya.

Kinerja merupakan hasil kerja atau presetasi kerja dan bagaimana proses suatu pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Sedangkan, kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Kinerja tolak ukur seseorang dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan atau ditetapkan. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Berdasarkan Batasan dan penjelasan tersebut, maka kinerja dapat diartikan suatu ukuran perbandingan, baik buruknya aktivitas organisasi melalui hasil – hasil yang dicapai (ouput) sesuai dengan tujuan organisasi. Intinya Batasan maupun yang akan digunakan, penelitian individu selalu diartikan sebagai suatu proses yang sistematis, dimana atasan mengkaji dan menilai kemampuan, perilaku kerja dan hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan tentang tindakan – tindakan dibidang sumber daya manusia.

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintah yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki

oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah lahirnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia.

Undang - Undang ini memberikan arah yang besar bagi proses pembangunan di indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. Pada era otonomi sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosia dan komersial . Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berperan sebagai lembaga sosial

yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat(1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat

desa.

sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan

sumber daya alam dan kebijakan.

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntunan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1996. Era otonomi ini membuat daerah – daerah yang ada di Indonesia berlomba – lomba untuk menjadi daerah terbaik untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahnya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih maju, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa diatur dalam UU No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu undang – undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang – undang tentang desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang rendah disbanding kelurahan, sehingga tidak sedikit

desa yang beralaih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial diminta masyarakat lainnya.

Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri. Karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Dengan demikian hal itu menjadi tantangan bagi penulis untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan dapat memperoleh pengalaman dan ilmu dari berbagai perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek. Maka berdasarkan alasan tersebut dari penjelasan diatas maka karestristik untuk mengangkat kondisi tersebut diatas dalam suatu penelitian dengan judul “**KINERJA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (MEKAR JAYA MANDIRI) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUMI RAHAYU TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait Bumdes, serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Menambah Pengetahuan Mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- b. Untuk Menambah Pengetahuan Mengenai Pentingnya Pengelolaan BUMDES Agar BUMDES Terus Berkembang Dalam Memperkuat Ekonomi Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen Sumber Daya Manusia ialah Pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan.

Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource (HR). Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien.

Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing – masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi.

Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor – faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri.

MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan.

Menurut Ahli Ganyang Tahun (2018:1) manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua makna yaitu manajemen sering dimaknai sama dengan kata to manage yang berarti mengelola. Kata mengelola mengandung makna perencanaan, pengorganisasian, penempatan, kepemimpinan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan perusahaan baik secara bersama sama maupun melalui karya orang lain. Sumber daya manusia adalah setiap individu, kelompok, dan semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

Menurut Mary Parker Follett Tahun (2015:3) manajemen sumber daya manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan orang – orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan – pekerjaan itu sendiri.

Menurut Mangkunegara Tahun (2013:2) mengatakan bahwa, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut A.F Stoner, dalam Siagian Tahun (2013:6), “Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.

Menurut Prasadja Ricardianto (2018:15) menyatakan bahwa : Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat di gunakan secara maksimal sehingga bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat maksimal.

Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, maka dapat ditarik Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penganturan sumber daya manusia mulai dari perencanaan, kegiatan – kegiatan yang ada didalam organisasi atau perusahaan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Kinerja

Kinerja didefinisikan sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi.

Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Umumnya, setiap organisasi sangat memperhatikan upaya pengoptimalan kinerja sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam hal ini, SDM menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam mencapai suatu kinerja yang baik.

Menurut Afandi (2018:83) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Menurut Wibowo (2017:4) Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja.

Menurut Simanjuntak (2021:1) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing – masing individu dan kelompok kerja perusahaan tersebut.

Menurut Kaswan (2017:278) Kinerja mencerminkan perilaku pegawai di tempat kerja sebagai penerapan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan, yang memberikan kontribusi atau nilai terhadap tujuan organisasi.

Menurut Rismawati dan Mattalata (2018:2) Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Darmadi (2018:34) Kinerja adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin (2017:14) Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan Pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang nya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan Pendidikan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi.

Kinerja yang baik merupakan suatu Langkah utama untuk menuju tercapainya suatu tujuan organisasi.

2.1.2.1. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi.

- a. Faktor kemampuan. Secara psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality artinya pimpinan dan pegawai yang memiliki IQ diatas rata – rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan Pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari – hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.
- b. Faktor motivasi. Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan pegawai terhadap situasi kerja di lingkungan organ isasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

Pendapat William Stern dalam teorinya tersebut Mangkunegara (2019:16-17), sebenarnya merupakan perpaduan dari pandangan teori heriditas dari Schopenhauer dan teori. Penulis, sependapat dengan pandangan teori konvergensi dari William Stern bahwa faktor – faktor

penentu prestasi kerja individu adalah faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasinya.

- c. Faktor individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisiknya. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari – hari dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya konsentrasi yang baik dari individu dalam bekerja, maka pimpinan mengharapkan mereka dapat bekerja produktif dalam mencapai tujuan organisasi.
- d. Faktor Lingkungan Organisasi. Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relative memadai.

2.1.2.2. Tujuan Dan Sasaran Kinerja

Tujuan kinerja menurut Wibowo (2015:48) adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan

mampu mewujudkan kinerja yang baik. Menurut Wibowo (2015:58) ada beberapa tingkatan tujuan antara lain :

- a. Corporate level merupakan tingkatan dimana tujuan dihubungkan dengan maksud dan nilai – nilai dan rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh untuk di capai.
- b. Senior manajemen level merupakan tingkatan dimana tujuan pada tingkat ini mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Business – unit, functional atau department level merupakan tingkatan dimana tujuan pada tingkatan ini dihubungkan dengan tujuan organisasi, target dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi atau departemen.
- d. Team level merupakan tingkatan dimana tujuan tingkat tim dihubungkan dengan maksud dan akuntabilitas tim, dan kontribusi yang diharapkan dari tim.
- e. Individual level yaitu tingkatan dimana tujuan dihubungkan pada akuntabilitas pelaku, hasil utama, atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individual dan focus pada hasil yang diharapkan untuk dicapai dan kontribusinya pada kinerja tim, departemen atau organisasi.

Menurut Mangkunegara (2019:20), Adapun bagi para pegawai, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja adalah :

- a. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan.
- b. Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru.
- c. Mengenali rintangan – rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai.
- d. Pegawai memperoleh pemahaman yang baik mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kerja mereka.

2.1.2.3. Aspek – Aspek Kinerja

Menurut John Bernadin (2017) menyatakan ada enam dimensi yang di gunakan untuk mengukur kinerja secara individu, antara lain sebagai berikut :

a. Kualitas

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas.

b. Kuantitas

Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

c. Ketetapan Waktu

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.

d. Efektivitas

Tingkat pengguna sumber daya organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam pengguna sumber daya.

e. Kemandirian

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melaksanakan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas guna menghindari hasil yang merugikan.

f. Komitmen Kerja

Tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kerja dengan perusahaan.

2.1.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan instansi yang di bentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat dan pengelolaannya didasarkan pada kebutuhan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai Lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokasi yang bertujuan untuk mencari

keuntungan dan Lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014)

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Status BUMDes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang – undang, namun sebagai badan hukum ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam pasal 132 Peraturan Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDes setidaknya harus terdiri dari:

- a. Penasehat dan
- b. Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional ada;ah perseorangan yang diangkat dan berhentikan oleh Kepala Desa.

Ciri utama BUMDes yang membedakan Lembaga komersial adalah :

- a. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaan di lakukan secara Bersama – sama
- b. Modal usaha sebanyak 51% berasal dari dana desa dan 49% dari masyarakat
- c. Operasional dilakukan dengan falsafah bisnis berbasis budaya lokal

- d. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- e. Laba yang diperoleh BUMDes di pergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
- f. Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa
- g. Pelaksanaan operasional BUMDes di awasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.

BUMDes ini telah diatur dalam Undang – Undang sebagaimana berikut ini:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelola dan pembubaran bumdes
- d. Peraturan daerah tanjung bumi rahayu nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa
- e. Perdes nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan badan usaha milik desa.

BUMDes yang baik adalah BUMDes yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes, antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana Kerjasama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- i. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan Lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama\
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)

- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara Bersama (Pemdes, BPD, anggota)

2.1.3.1. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Klasifikasi jenis usaha BUMDes dijelaskan pada bagian keempat pasal 19 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

- a. Usaha serving, jenis usaha ini biasanya adalah usaha yang berbentuk bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Contoh usaha pelayanan umum yaitu usaha listrik, air, lumbung pangan, sumber daya lokal atau teknologi tepat guna lainnya.
- b. Usaha renting, jenis usaha ini dapat berupa penyewaan barang, gedung, alat transportasi, toko, perkakas pesta, asset tanah dan atau barang sawaan lainnya yang bermaksud memperoleh keuntungan bagi BUMDes dan PAD.
- c. Usaha brokering, badan usaha desa dapat menjalankan jenis usaha ini seperti jasa pembayaran listrik pasar Desa dan jasa lainnya.

- d. Usaha trading, desa dapat menjalankan dagangan kebutuhan pokok maupun jenis kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Usaha banking, jenis usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman usaha yang mudah kepada masyarakat desa untuk membantu tumbuhnya usaha mikro oleh pelaku usaha ekonomi desa.

2.1.3.2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4 Permendesa no 4 tahun 2015 mengemukakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan beberapa pertimbangan, yaitu atas inisiatif desa dan atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam di desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sementara tujuan BUMDes sendiri, sesuai dengan pasal 3 Permendesa no 4 tahun 2015 yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau/ dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah pertama, meningkatkan perekonomian desa, kedua meningkatkan pendapatan asli desa, ketiga meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2012:8). BUMDes menurut Undang – undang nomor 32 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

2.1.3.3. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama ini. Salah satu faktor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola BUMDes di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian 23 Peraturan Menteri dan Desa No 4 Tahun 2015 24 Perda Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 29 masyarakat desa. Pendirian pengelola BUMDes yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi

akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.²⁵ Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi meningkatkan pendapatan asli desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong ekonomi pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar 25Singgih Tri Atmojo, Skripsi: “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” (Jember: Universitas Jember, 2015), hal. 3 30 pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikembangkan oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014).

Prinsip – prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridwan, 2014), adalah :

- a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa minta untuk meningkatkan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
- d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan Lembaga ekonomi pada umumnya ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan suatu perwujudan dari pengelola BUMDes di desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Memulai atau mengelola bisnis atau usaha Bumdes memerlukan perencanaan dan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh Bumdes. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis yang ada pada Bumdes adalah membuat “kerangka” atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan baik. Osterwalder & Pigneur (2016; 48).

BUMDes yang baik adalah BUMDes yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana Kerjasama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
- i. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

2.1.4. Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan masyarakat adalah negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahteraan lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera.

Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya. Sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan halal, yang haram pun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang – orangnya dalam keadaan Makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang – bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu.

Menurut Suharto (2019:85) Menyatakan kesejahteraan masyarakat dianggap boros dan karenanya baru perlu dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi atau pendapatan asli daerah (PAD) telah tinggi. Kemampuan ekonomi tidak secara otomatis dan linear berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Midgley (2020:12) Menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga

unsur yaitu : pertama, setinggi apa masalah masyarakat dikendalikan; kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

2.1.4.1. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 pasal 3 Tahun 2012, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menengah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.4.2. Upaya kesejahteraan masyarakat

Beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu :

- a. Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam
- b. Menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang Kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis.

- c. Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis.
- d. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal.

2.2. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel. 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

1.	Nama Penelitian Tahun Peneliti	Abd.Asis (2021)
2.	Judul Penelitian	Kinerja Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa
3.	Variabel Yang Diteliti	Indikator
4	Alat Analisis	Kualitatif

5	Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kinerja BUMDes dan kesejahteraan masyarakat
---	------------------	---

1.	Nama Penelitian Tahun Penelitian	Hariany Idris , Samsinar (2021)
2.	Judul Penelitian	Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pembangunan desa
3.	Variabel Yang Diteliti	Indikator
4	Alat Analisis	Pendekatan kualitatif
5	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja badan usaha milik desa selama ini menunjukkan pengaruh yang positif bagi pada umumnya pembangunan desa

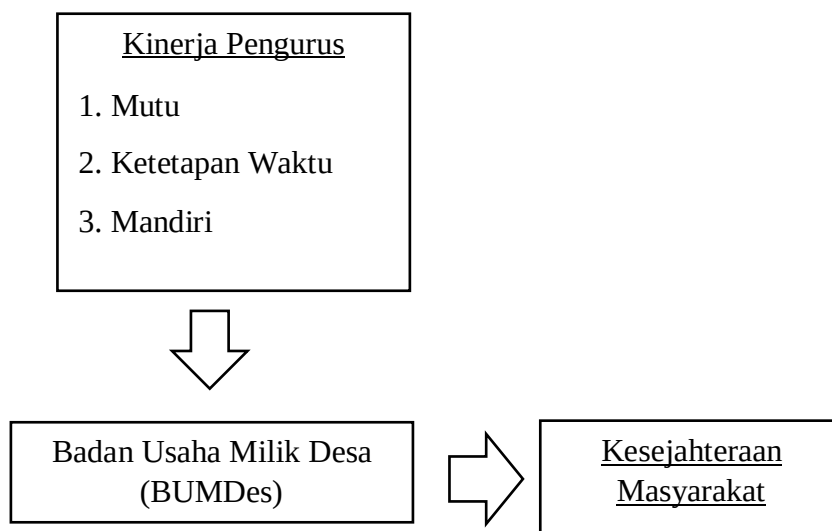
1.	Nama Penelitian Tahun Penelitian	Firman Maulana dan Muhammad mas, ud said (2021)
2.	Judul Penelitian	Kinerja organisasi dan pemberdayaan masyarakat pada badan usaha milik desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat
3.	Variabel Yang Diteliti	Indikator
4	Alat Analisis	Metode Kualitatif

5	Hasil Penelitian	Hasil penelitian kinerja organisasi dan pemberdayaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
---	------------------	--

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di fokuskan pada Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa Untuk Mensejahterakan Masyarakat. berdasarkan landasan teori dan penelitian maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji sebagai berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pikir



Sumber S.T Nurhayati 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Diharapkan dengan penelitian di desa tersebut dapat dijadikan data dan fakta memperkuat BUMDes dimasa mendatang. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan tepatnya pada tahun 2022, Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini direncanakan sebagai table berikut.

Tabel 3.1.
Jadwal Kegiatan Penelitian Skripsi Tahun 2022

Kegiatan \ Waktu	Waktu 1 Semester (5 Bulan)				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Penyusunan Skripsi					
Ujian Proposal Skripsi					
Penelitian Lapangan					
Seminar Hasil					
Ujian Skripsi					

Sumber penelitian 2022

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

3.3.2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari Pengurus BUMDes Bumi Rahayu Tanjung Selor yang terkait dengan penelitian.

3.4. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Kinerja Pengurus BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

3.4.1. Penentuan Informan/Narasumber

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini merasa masih kurang lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. (Sugiyono, 2021: 97) Artinya dalam pengambilan data tidak selalu pada satu atau dua narasumber saja.

Sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi tiga sampai empat dan seterusnya apabila data yang dibutuhkan masih dianggap kurang. Kelebihan menggunakan snowball sampling sangat cocok pada jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode snowball sampling sangat cocok dalam menganalisa sebuah 24 permasalahan dengan menggunakan teknik wawancara dan juga kelebihan dalam menggunakan teknik snowball sampling dianggap mudah digunakan, sederhana, waktu yang efisien dan hanya membutuhkan sedikit rencana tenaga kerja. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan atau narasumber adalah Kepala Desa , Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta beberapa staf yang berada di Kantor Desa Bumi Rahayu, serta

beberapa warga yang dianggap mempunyai informasi kunci (key-information) yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Gulo (2022:110), “Metode Pengumpulan Data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian”. Jika dilihat dari pengertian metode pengumpulan data menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya.

Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang ada. Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala – gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode sampai cara – cara pencatatannya.

Dalam hal ini dapat diobservasi adalah mengenai langkah – langkah yang telah dilakukan masyarakat desa Bumi Rahayu dalam keikutsertaannya dengan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Kriyantono (2021:106), metode observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat

dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu. Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama atau pun berbeda. Observasi difokuskan pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti.

3.5.2. Wawancara (interview)

Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Wawancara (interview) merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkret terkait dengan permasalahan yang teliti. Sehingga berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data – data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam Teknik ini digunakan Teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Pencakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban -jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Metode ini

di gunakan untuk mendapatkan data dari kepala desa maupun pada masyarakat desa.

3.5.3. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi (2021:114), cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembangan. Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data – data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa buku – buku yang ada untuk mencari konsepsi – konsepsi dan teori – teori yang sangat sehubungan erat dengan permasalahan. Sumber pada laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2015: 400-401). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono,2015:204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi berikut:

3.6.1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi Pustaka.

3.6.2. Reduksi data

Reduksi data merupakan menserderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

3.6.3. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3.6.4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Pada penelitian kualitatif kesimpulan dapat

berlangsung pada saat proses pengumpulan data, sehingga masih bersifat kabur dan diragukan. Jadi kesimpulan harus selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Proses verifikasi hasil temuan ini dapat berlangsung singkat dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang (cross check) dengan temuan yang lainnya (Idrus, 2018: 152). Peneliti kualitatif melakukan verifikasi agar dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reabilitas hasil temuannya, sehingga kesimpulan peneliti bersifat kokoh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah BUMDes

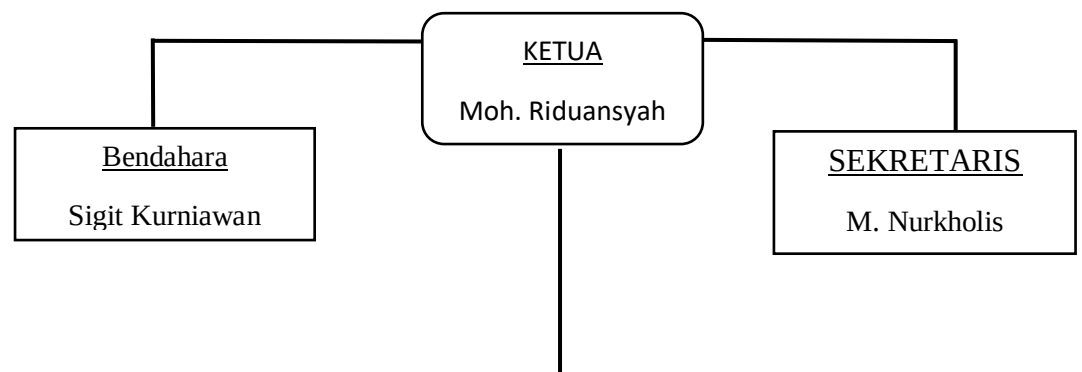
Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) didirikan oleh pemerintahan desa bumi rahayu 5 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2017 dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki dengan unit usaha pertenakan pakan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Lembaga ini di beri nama Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) yang berkedudukan di Desa Bumi Rahayu kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Daerah kerja BUMDes ini hanya beroperasi di sekitaran Desa Bumi Rahayu, namun jika kemungkinan Lembaga BUMDes (Mekar Jaya Mandiri) ingin membuka cabang tempat lain. Maksud pendirian BUMDesa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bumi Rahayu melalui usaha yang di jalankan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif industri, budidaya ikan air tawar , dan industri batu bata serta sektor lainnya.

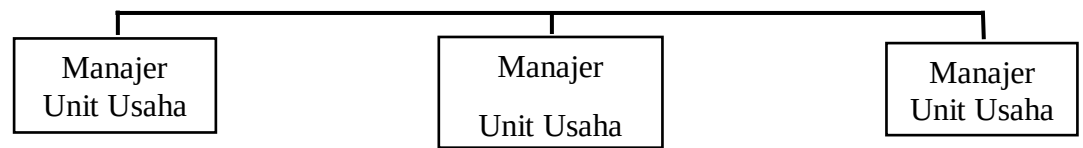
BUMDes (Mekar Jaya Mandiri) mempunyai Struktur Organisasi dalam melakukan kegiatan operasional Lembaga BUMDes yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, dengan ketentuan yang dapat menjadi pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat – syarat yang telah diatur dalam AD/ART, yaitu :

- a. Pendidikan paling rendah SMA
- b. Memiliki jiwa wirausaha
- c. Bertempat tinggal dan menetap didesa setempat sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun
- d. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun
- e. Berbadan sehat dan cakap
- f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat des
- g. Tidak berasal dari unsur perangkat desa
- h. Bersedia bekerja penuh waktu
- i. Tidak berstatus pegawai negeri sipil

Untuk lebih jelas mengenai susuna sturuktur organisasi BUMDes (Mekar Jaya Mandiri) dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

STRUKTUR KEPENGURUSAN
BUMDES (MEKAR JAYA MANDIRI)
DESA BUMI RAHAYU





Tugas pokok dan fungsi Ketua, Sekretaris, Bendahara BUMDes

1. Ketua :
 - a. Memimpin organisasi BUMDes
 - b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
 - c. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
 - d. Mengangkat dan memberhentikan pengelola Unit Usaha BUMDes dengan persetujuan penasehat BUMDesa
 - e. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar organisasi
 - f. Bertindak atas nama Lembaga untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain – lain kegiatan yang di pandang perlu dilaksanakan
 - g. Bertindak atas nama Lembaga untuk menghadiri kegiatan pertemuan atau undangan oleh pihak lain jika dibutuhkan
 - h. Melakukan tanda tangan persetujuan atau menolak menanda tangani persetujuan atas pengeluaran uang jika tidak didukung oleh dokumen yang sah atau tidak sesuai kebenarannya sebelum dilakukan pembayaran oleh bendaharawan bumdesa
 - i. Menyampaikan laporan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Komisaris/penasehat Bumdesa

- j. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban atas kegiatan Bumdesa disetiap akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggung jawaban
- k. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus harian lainnya dan pengurus unit usaha Bumdesa dan Memberikan teguran mulai dari yang ringan yaitu teguran tertulis, surat peringatan sampai dengan rekomendasi pemberhentian kepada penasehat yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan

2. Sekretaris

- a. Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes
- b. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua Bumdesa
- c. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- e. Melakukan verifikasi kebenaran atas penerimaan dan pengeluaran uang sebelum dibayarkan oleh bendahara Bumdesa
- f. Membuat laporan keuangan konsolidasi Bumdesa setiap akhir bulan
- g. Membuat laporan keuangan konsolidasi disetiap akhir tahun kegiatan
- h. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- i. Mengelola surat menyurat secara umum
- j. Melaksanakan pengelola atas barang investasi milik Bumdesa
- k. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes

1. Bersama-sama dengan pengurus harian lainnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus unit usaha Bumdesa

3. Bendahara

- a. Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumberdaya unit usaha BUMDes diantaranya
- b. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan Bumdesa beserta unit usaha BUMDes
- c. Melaksanakan pencatatan atas penerimaan uang masuk dan uang keluar di BUMDes
- d. Melakukan pembayaran uang kepada penerima jika didukung oleh dokumen yang syah dan telah diverifikasi kebenarannya oleh sekretaris dan sudah mendapat persetujuan dari ketua Bumdesa
- e. Mengelola gaji dan insentif pengurus operasional dan pengurus unit usaha Bumdesa
- f. Melakukan pembayaran atas pengadaan barang/jasa unit usaha Bumdes
- g. Pengelola penerima keuangan unit usaha Bumdes selama unit usaha BUMDes belum memiliki staf keuangan
- h. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes melakukan tutup buku Kas dan Bank setiap akhir bulan dan akhir minggu jika dibutuhkan
- i. Mengarsipkan semua dokumen keuangan Bumdesa secara teratur dan rapi
- j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- k. Menyetorkan uang kas bumdesa ke rekening BUMDes jika jumlah uang kas sudah melebihi batas saldo kas maksimum yang ditetapkan

- l. Menyimpan buku cek, slip penarikan dan penyetoran uang di rekening Bumdesa
- m. Membuat laporan rekonsiliasi Bank atas rekening koran yang diterima di setiap akhir bulan
- n. Bersama – sama dengan pengurus harian lainnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus unit usaha BUMDes.

4.1.2. Visi Misi Dan Tujuan BUMDes Bumi Rahayu

4.1.2.1. Visi Menjadi Lembaga Pengembangan Ekonomi Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Perekonomian masyarakat yang adil, jujur, berkelanjutan dan yang Mandiri, Partisipatif dan Demokratis.

4.1.2.2. Misi

1. Meningkatkan Pengetahuan, keterampilan / kreatifitas pengurus dan warga masyarakat desa.
2. Menggali dan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi desa.
3. Mengelola dana program yang masuk ke Desa terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha ekonomi pedesaan.
4. Membangun Tata Kelola Usaha Desa yang Transparan, Partisipatif, Tanggungjawab dan Saling Percaya.
5. Mengembangkan rencana Kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

4.1.2.3. Tujuan

1. Mengembangkan Dana Desa sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat.
2. Mendorong Usaha Kecil Kreatif dan Usaha Rumah Tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal kerja
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit Usaha BUMDes melalui kerja sama usaha.
4. Membantu Mewujudkan program pemerintah desa untuk menjadikan Desa Bumi Rahayu sebagai Desa Mandiri dan Desa Terdepan.
5. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Desa melalui Kegiatan Usaha BUMDes.
6. Menciptakan Lapangan Pekerjaan.

4.1.3. Keadaan Demografi

Desa Bumi Rahayu terletak di dalam wilayah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor

Luas wilayah Desa Bumi Rahayu 99,67 Ha dimana 90% berupa daratan yang bertopografi berbukit – bukit, dan 10% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Iklim Desa Bumi Rahayu, sebagaimana Desa – Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung selor.

4.2. Hasil Penelitian

Berikut ini pemaparan hasil penelitian yang di peroleh melalui observasi dan wawancara dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan atau fokus penelitian skripsi dengan judul “Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan” sebagai berikut :

4.2.1. Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa bumi rahayu tanjung selor kabupaten bulungan belum sesuai dengan pendapat

Harun AL. (2021) tentang penilaian kinerja organisasi. Hal ini di buktikan dengan masih adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat Pencapaian Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Tingkat pencapaian kinerja, pemangku kepentingan atas pemenuhan kebutuhan mereka seperti kebutuhan pemegang saham, kebutuhan pelanggan atas pelayanan dan produk, kebutuhan kepuasan kerja karyawan.

Dalam UU No.6/2014 pasal 88 mengatakan pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Ketua BUMDes Bumi Rahayu Di Mekar Jaya Mandiri M.Muh Riduansyah (39 Tahun). Pada saat pembentukan BUMDes di tahun 2017 dibentuk dalam rapat musyawarah dari pemerintah desa terkait dan pada hari itu juga dibentuk voting dan tidak ada perdes yang menjadi dasar dalam pembentukannya.

“Pada saat saya terpilih sebagai ketua, saya menanyakan kepada desa perdesnya sudah ada kah pak? Jawabnya iya sudah ada berarti saya anggapnya sudah aman tetapi beberapa tahun berjalan saya tidak pernah melihat perdes tersebut secara fisik dan juga belum pernah diserahkan kepada saya.....” (wawancara tanggal 27 Juni 2022)

Pendapat serupa juga di sampaikan oleh sekertaris BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri M.Nurkholis (35 Tahun). Mengenai aturan yang menjadi dasar pembentukan BUMDes belum terlalu jauh kita pahami yang

kita tau bersama adalah adanya BUMDes yang dibentuk pada saat adanya kegiatan sosialisasi dari dinas terkait secara terperinci belum kita pahami.

“Pada saat pemilihan ketua BUMDes saya juga termasuk yang dicalonkan dengan melalui siapa suara terbanyak maka itu yang jadi ketua dan suara terbanyak ke dua yang jadi sekertaris dan suara terbanyak ke tiga jadi bendahara..... “(wawancara tanggal 27 Juli 2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh sekertaris Desa Bumi Rahayu Winarto (49 Tahun). Dari pihak desa sudah memfasilitasi pada saat pembentukan di tahun 2017 saya hadir dan saya sudah sampaikan perdesnya ada meskipun belum saya perlihatkan.

“maksudnya BUMDes kita ini berjalan aja dulu meskipun beberapa aturan administrasi yang belum selesai jangan juga terlalu kaku terhadap aturan yang ada dan sampai hari ini juga belum ada kegiatan dari BUMDes.....”(wawancara 29 tanggal Juli 2022)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua RT 02 Nasiroh (41 Tahun). Mengenai aturan dalam pembentukan BUMDes saya tidak mengetahuinya dan pada saat pembentukan juga tidak ada.

“tidak banyak yang saya ketahui tentang BUMDes karena juga tidak ada pernah ada undangan untuk membahas BUMDes kalo mau tau lebih banyak langsung ke kaur – kaur desa saja karena saja yang tau kalau mengenai ini”(wawancara 6 Juli 2022).

2. Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Mandiri

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa tentunya sangat diharapkan dalam menunjang perekonomian desa dan dapat membantu pendapatan asli desa tetapi beberapa tahun terakhir sejak terbentuknya belum ada unit usaha / kegiatan yang ada terlihat dan bisa dikatakan terjadi kevakuman hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan pihak aparat desa Bumi Rahayu :

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bumi Rahayu Sri Widodo (48 Tahun). Desa telah mempersiapkan dana operasional BUMDes dan telah disiapkan beberapa yang bisa dikelola oleh BUMDes.

“Memang benar adanya sejak berdirinya BUMDes Tahun 2017 sampai sekarang kami dari pihak perangkat desa telah mewadahi BUMDes agar dapat berjalan dan banyak potensi desa kita yang bisa kita kembangkan salah satunya kita telah melakukan simpan peminjam dari ketua pelaksanaan (Direktur) yaitu untuk perternakan pakan, pembudidaya ikan air tawar, industri batu bata di desa bumi rahayu.....”(wawancara tanggal 8 Juli 2022).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh kaur kesejahteraan Desa Bumi Rahayu Saiful H (31 Tahun). Selaku perangkat desa sudah lama kami menunggu rencana kerja dari BUMDes tetapi sampai hari ini juga belum kami terima jadi kami dari perangkat desa juga bingung untuk mengambil Langkah.

“Berkenaan dengan BUMDes sudah disiapkan dana untuk operasional BUMDes kami menunggu dari Pengurus BUMDes untuk menyerahkan rencana kerja agar dapat kita tau program apa yang akan dijalankan agar memudahkan dalam pengawasan tapi sampai sekarang juga belum ada

masih dalam proses untuk menuju program kerja dari BUMDes.....”(wawancara tanggal 8 Juli 2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ketua BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri M.Moh Riduansyah (39 Tahun). Saya selaku ketua belum berani untuk mengambil uang yang dari desa yang akan digunakan sebagai modal awal karena salah satu syarat dalam pembentukan BUMDes adalah adanya perdes yang menjadi dasar tetapi dalam 2 tahun terakhir sejak pembentukan saya belum pernah melihat aturan tersebut.

“BUMDes dalam tahap sekarang ini fokus dulu agar perekonomian masyarakat agar lebih membaik dan memanfaatkan potensi kemudian kita memikirkan program apa yang kita akan jalankan dan hari ini BUMDes dalam proses pengurusan.....”(wawancara tanggal 12 Juli 2022).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat Jinami (61 Tahun). Sebagai masyarakat harapannya BUMDes ini dapat berjalan agar dapat membantu masyarakat.

“BUMDes harus lebih pro aktif, dan bisa berkembang dan bisa memanfaatkan potensi desa yang ada dan juga harus mitra kerja dalam menjalankan suatu unit usaha dan BUMDes dapat menjadi Wadah pembangunan SDM.....”(wawancara tanggal 12 Juli 2022).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Firmaninsih (40 Tahun). Sebagai masyarakat harapannya BUMDes ini bisa berjalan untuk melanjutkan program yang di harapkan.

“BUMDes harus bisa lebih maju lagi dan membantu perekonomian masyarakat agar membaik dan bisa merasakan manfaat yang ada di Bumdes.....”(wawancara tanggal 14 Juli 2022).

3. Adanya feedback/umpan balik yang di dapat oleh kinerja pengurus BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam adanya feedback/umpan balik yang di dapat Badan Usaha Milik Desa sudah mencapai timbal balik yang di dapat oleh BUMDes meskipun belum maksimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa adanya feedback/umpan balik yang di dapat Badan Usaha Milik Desa sudah mencapai timbal balik yang di dapat oleh BUMDes meskipun belum maksimal, karena yang seharusnya 4 program unit usaha sudah berjalan namun hanya 2 program yang berjalan sehingga timbal balik yang di dapat belum mencapai apa yang diharapkan BUMDes. Upaya yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dengan cara, pengurus BUMDes lebih fokus dan meningkatkan lagi kinerja BUMDes dalam mengembangkan setiap unit yang akan dikelola oleh BUMDes, dan mencari sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengembangkan unit-unit usaha dan mengisinya kekosongan manager setiap unit usaha.

4. Adanya kegigihan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki semangat yang tinggi dan bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa adanya kegigihan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sudah dilakukan namun pada kenyataannya BUMDes belum bekerja setiap harinya ataupun hanya 2 unit usaha yang bekerja setiap

harinya karena hal ini belum adanya fasilitas dari pemerintah desa. Upaya yang dilakukan supaya pemerintah desa dapat memberikan fasilitas untuk BUMDes sehingga dapat efektif dan efisien apabila ada tempat untuk BUMDes bekerja atau kantor dan dapat bekerja setiap harinya.

5. Adanya kemampuan Kinerja Pengurus BUMDes dalam melakukan sosialisasi

Dalam setiap organisasi harus memiliki kemampuan dalam melakukan sosialisasi. Dari hasil penelitian BUMDes sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun belum berjalan dengan baik, karena kurang kemampuan BUMDes dalam menjelaskan di bidang unit usaha sehingga kurang partisipasi dari masyarakat terhadap BUMDes. Adapun upaya yang dilakukan BUMDes akan meningkatkan kemampuan dalam bidang tersebut atau merekrut sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yaitu informan sahransyah (41 Tahun). Setiap bulan kita melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat setempat.

“untuk membahas lebih jelas kinerja pengurus BUMDes saya pun sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan membahas bidang unit usaha yang akan di jalankan.....”(wawancara tanggal 14 Juli 2022).

6. Tidak adanya Mitra BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri

Dalam kelangsungan berjalannya suatu unit usaha tentunya BUMDes harus melibatkan pihak ketiga yaitu mitra kerja baik itu perusahaan milik swasta atau badan usaha yang bisa diajak kerja sama dalam hal ini BUMDes bumi rahayu Mekar Jaya Mandiri harus memilih mitra dalam menjalankan

program dan disesuaikan dengan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes dan disesuaikan dengan AD/ART BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri.

Hal ini diperkuat dengan tidak berjalannya BUMDes semenjak didirikan pada tahun 2017 sampai sekarang. Pendapat ini berjalan dengan yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri M.Moh Riduansyah (39 Tahun).

“BUMDes dalam tahap sekarang ini fokus dulu agar perekonomian masyarakat agar lebih membaik dan memanfaatkan potensi kemudian kita memikirkan program apa yang kita akan jalankan dan hari ini BUMDes telah dalam proses pengurusan.....”(wawancara tanggal 12 Juli 2022).

7.Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia didesa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam menunjang dan mengelolah suatu Lembaga/organisasi terkhusus untuk mengelolah Badan Usaha Milik Desa. Sumber daya manusia menjadi organ yang sangat vital karena berkaitan yang akan menggerakkan organisasi dan akan menentukan keberhasilan tujuan yang telah di tetapkan secara bersama.

Dengan keterbatasan kapasitas tentunya secara tidak langsung akan sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsung organisasi dan akan menjadi penghambat dalam keberlangsungan organisasi, hal ini terbukti dengan sulitnya dalam perekrutan sumber daya manusia untuk mengisi di struktural Badan Usaha Milik Desa.

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ketua BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri M.Moh Riduansyah (39 Tahun). Banyaknya pengurus yang mengundurkan diri dan menganggap tidak sanggup untuk menjalankan tugas yang telah di berikan.

“salah satu pengurus yang bilang ke saya kalau saya untuk mengoperasikan computer saya masih kurang terampil, sebaiknya cari yang lebih bisa untuk bidang ini.....”(wawancara tanggal 26 Juli 2022).

Belum berkembangnya proses konsolidasi dan Kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan desa.

Hal ini menjadi penghambat yang utama meskipun dalam perjalanannya telah di adakan rapat beberapa kali tetapi belum juga menemukan kesepakatan sejak berdirinya dalam kurang waktu 2 tahun tidak memiliki program yang bisa di jalankan dan terhitung jalan ditempat.

Proses konsolidasi sangat dibutuhkan dalam persamaan pandangan dan penyelesaian problem yang sedang dihadapi oleh BUMDes dan penyusunan perencanaan program apa saja yang akan dijalankan dan menjadi hal sangat prioritas serta merumuskan potensi yang dimiliki oleh desa yang sifatnya pengelolaannya membutuhkan jangka Panjang. Proses konsolidasi juga sangat penting untuk membangun mitra BUMDes yang akan diajak Kerjasama dan akan sangat membantu dalam pengembangan unit – unit usaha yang akan dibentuk melalui penyertaan modal.

Untuk dapat melihat paparan mengenai Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

dapat mengemukakan beberapa hal di lihat dari indikator – indikator sebagai berikut:

a. Mutu

Ukuran relatif dari kebendaan. Mendefinisikan mutu dalam rangka kebendaan sangat umum sehingga tidak menawarkan makna operasional. Secara operasional mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Sebenarnya mutu adalah kepuasan pelanggan.

“ Kalau soal Kinerja BUMDes itu cukup baik karena setiap ada permasalahan kami selalu membuat keputusan bersama masyarakat tentang BUMDes dalam menimbangkan kepuasan pada ekspektasi masyarakat”. (Wawancara Tanggal 29 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes yang di paparkan diatas, dapat diuraikan bahwa semua komponen yang terkait dalam Kinerja BUMDes Bumi Rahayu sudah mampu melakukan keputusan bersama yang cukup baik. Hal ini dapat juga dilihat dari unit usaha yang dijalankan, dimana setiap pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah.

b. Ketetapan Waktu

Suatu perikatan yang ditanggungkan pelaksanaanya sampai waktu yang ditentukan.

“Kinerja Pengurus BUMDes dalam melakukan kegiatan harus meluangkan waktu dan tanggung jawab atas pelaksanaan dan memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha yang di jalankan” (wawancara tanggal 29 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang dipaparkan diatas maka dapat dikatakan bahwa hal ketetapan waktu dalam Kinerja

Pengurus BUMDes harus profesional dalam menjalankan kegiatan yang di laksanakan. Serta adanya kekuatan diri sendiri untuk bisa meluangkan waktu kerjasama ini.

c. Mandiri

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap proses kehidupan. Meski manusia terlahir membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan berjalannya waktu dan tugas perkembangan, seorang remaja akan perlahan melepaskan diri dari beberapa ketergantungan, seperti orang tua dengan belajar untuk mandiri.

“Menurut saya sendiri (sarni 38 tahun), kemandirian dalam proses kehidupan itu sangat baik karena secara pribadi kita harus mandiri untuk bisa menjalankan kegiatan/tugas rutin secara mandiri agar bisa mencapai tujuan yang di targetkan dan memiliki kemampuan untuk berinisiatif, berkreasi dan berinovasi, disiplin pribadi dan bertanggungjawab, agar tidak membebankan orang lain untuk kegiatan ini”.....(Wawancara tanggal 29 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam kemandirian itu sangat baik di karena secara optimal mandiri itu proses kehidupan untuk bisa berkembang dan menjalankan tugas masing – masing dan kemandirian mampu mengambil keputusan dan siap dengan resiko yang mungkin muncul.

Adapun Beberapa Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bumi Rahayu :

1. Simpan Pinjam
2. Usaha Budidaya Ikan Tawar
3. Pertenakan Pakan

4. Lain-lainnya

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dari beberapa narasumber yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menilai bahwa Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Bumi Rahayu belum memadai dilihat dari segi sistem kinerja Pengurus program BUMDes, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang diuraikan berikut ini.

Dalam sistem Kinerja BUMDes Bumi Rahayu yang dijalankan oleh Pengurus sesuai dengan AD/ART dan tetap mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan. Namun, dalam proses pelaksanaan program BUMDes Bumi rahayu ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes yang tidak terpenuhi. Dalam pengelolaan program BUMDes Bumi Rahayu belum sepenuhnya memenuhi prinsip – prinsip pengelolaan yang baik dikarenakan yang tersusun secara teknis dan sistematis sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai administrasi dan kegiatan yang dijalankan. Serta kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan BUMDes Bumi Rahayu. Begitupun pada prinsip profesioalisme yang dalam pelaksanaan program BUMDes hanya dijalankan dan dikelola seadanya oleh pengurus karena kurangnya tenaga kerja (SDM) yang handal dalam bidang tersebut sehingga tidak adanya sistem kinerja yang baik secara teknis.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa BUMDes Bumi Rahayu berusaha mengambil peran dengan menyediakan budidaya ikan air tawar bagi warga desa untuk membuka peluang usaha. BUMDes Bumi Rahayu telah menjadi fasilitator bagi pengusaha dan perternakan pakan dengan menyediakan dana untuk dipinjamkan sebagai modal awal ataupun untuk meringankan ternak dalam mendanai segala keperluannya untuk mengembangkan perbudidayakannya. Kinerja BUMDes Bumi Rahayu sebagai instrumen penguat ekonomi desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dampaknya secara ekonomi belum dirasakan. Hal ini disebabkan pengelolaan BUMDes yang tidak maksimal. Dalam proses Kinerja pelaksanaan program BUMDes Bumi Rahayu tidak terlepas dari kendala – kendala dan masalah yang dihadapi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pengelola BUMDes Bumi Rahayu masalah yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga kerja dalam mengelola program BUMDes Bumi Rahayu padahal SDM merupakan hal utama kinerja pengurus pelaksanaan kegiatan BUMDes. Para karyawan BUMDes Bumi Rahayu juga kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, yang menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan BUMDes Bumi Rahayu adalah masyarakat desa yang masih kurang paham dan mengerti adanya BUMDes itu. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya keberadaan BUMDes ini sehingga mereka menyepelkan BUMDes Bumi Rahayu dan tidak terlalu mengurus sistem kegiatan yang di jalankan dampaknya secara ekonomi belum bisa dirasakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bumi Rahayu belum optimal, seperti kurangnya sosialisasi yang di lakukan BUMDes kepada masyarakat, partisipasi dari masyarakat, belum tercapainya tujuan dan sasaran BUMDes. Sedangkan dari hasil penelitian bahwa masih belum optimalnya sosialisasi BUMDes kepada masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, tujuan dan sasaran BUMDes belum tercapai, kurangnya fasilitas dari pemerintah desa, kurangnya kegigihan BUMDes, dan kurangnya time management yang dilakukan BUMDes. Sehingga Kinerja BUMDes Bumi Rahayu sebagai instrument penguat ekonomi desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dampaknya secara ekonomi belum bisa dirasakan.

Kinerja Pengurus BUMDes yang belum memadai tersebut tidak terlepas dari banyaknya kendala dan mutu yang dihadapi dalam indikator Kinerja BUMDes (Mekar Jaya Mandiri) seperti kurangnya SDA yang handal dalam bidang ini, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kinerja BUMDes (Mekar Jaya Mandiri) dalam mengelola dan menjalankan tugas dan wewenangnya. Serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat desa akan keberadaan BUMDes tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut , maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDes Bumi Rahayu Mekar Jaya Mandiri harus di musyawarahkan kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait dengan difasilitasi oleh Lembaga yang terkait dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta evaluasi secara keseluruhan terkait dengan kondisi internal BUMDes.
2. Persamaan pandangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terlebih lagi para perangkat desa agar menghindari konflik yang akibatnya merugikan masyarakat.
3. BUMDes harus melakukan konsultasi kepada pendamping desa yang ad a jika permasalahan belum juga menemukan kesepakatan, maka bisa mengundang Dinas terkait untuk mengambil jalan tengah.
4. Orang – orang yang terlibat dalam kepengurusan BUMDes harus paham betul terkait dengan mekanisme dalam menjalankan BUMDes dan hal – hal yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes lebih tepatnya harus mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan BUMDes.
5. Pengembangan usaha yang berkelanjutan oleh BUMDes mengingat banyak potensi desa yang dapat di kembangkan.
6. Pemerintahan Desa harus melakukan pendampingan teknis dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa pada saat BUMDes sudah mulai berjalan.

7. Kerjasama antar seluruh pihak terkait harus berjalan dan hubungan sinergis dan komunikasi antara Lembaga harus harmonis agar dapat memperkecil ruang terjadinya konflik yang berakibat pada tidak berjalannya BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulitiyani Rosidah, (2019) *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori dan pengembangan dalam konteks organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (EdisiRevisi), Jakarta : PT RinekaCipta
- Ali, Rahman, *Pengetahuan Baru Kesejahteraan masyarakat dalam Kontek Lemhanas*, Jakarta: Lemhanas RI, 2017.
- Adi, Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan*. Bandung : Refika Aditama, 2018.
- Alkadafi, M. 2019. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2019. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 32-40.
- Azwar, Saifudin. 2021. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bachrein, S. 2019. Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan \ Kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No. 2*. Juni 2015: 133 – 149.
- Bungin, B. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Cardoso, G. F. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta

Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi*

Kedua. Jakarta: Gunung Agung.

Harmiati, A. A. Z, Zulhakim, A. A. & Sos. S. (2017). Eksistensi Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi

Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi

ASEAN. Retrieved from: *Jurnal Unihac Bengkulu, Clustern Ekonomi Setnas*

ASEAN.

Irma, I, Ladjin, B, & Widyatama, A. (2020). Peluang Riset Strategi Bumdes

Sebagai Dasar Pengembangan Perekonomian Masyarakat : Sebuah Studi

Literatur. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 139. 149.

Jaryono dan Tohir. 2019. Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” dalam pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa di desa susukan kecamatan sumbang kabupaten banyumas. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis*. Vol 9, No 9,

Moleong, J Lexy, 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Rosdakarya. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol 13 No. 1.

Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 14 tahun 1015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

LAMPIRAN**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Bersama Kepala Desa Bumi Rahayu



Bersama Sekretaris Desa Bumi Rahayu



Bersama Ketua / Pengurus BUMDes



Bersama Masyarakat Desa Rt 02



Bersama Masyarakat Desa Bumi Rahayu



Bersama Masyarakat Desa Bumi Rahayu



Bersama Staf Desa Bumi Rahayu



Bersama Masyarakat Desa Bumi Rahayu

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Sejarah Pembentukan BUMDes ?
2. Kapan BUMDes Bumi Rahayu Di bentuk ?
3. Apa saja program BUMDes dan Kegiatan BUMDes ?
4. Bagaimana Peran Desa Dalam Mendukung BUMDes Di Desa Bumi Rahayu ?
5. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan BUMDes ?
6. BUMDes Bumi Rahayu Mempunyai Potensi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ,Kira – kira Apa Yang Menghambat agar hal itu bisa dilakukan ?
7. Sejauh Mana Desa Mendorong Agar BUMDes Bumi Rahayu Dapat Dan Berjalan ?
8. Hambatan Apa Yang Membuat BUMDes Bumi Rahayu Tidak Berjalan ?
9. Apakah Ketua BUMDes Bumi Rahayu Dalam Menjalankan Tugas, Sudah Melakukan Koordinasi Dengan Bapak Sebagai Kepala Desa ?
10. Apakah Sudah Dilakukan Rapat Pertemuan Dengan Seluruh Pihak Terkait Untuk Membahas Keberlanjutan BUMDes ?

PENGURUS BUMDES

1. Apa Saja Program Yang Ada Di BUMDes?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi BUMDes?
3. Bagaimana Pengurus Mengatasi Permasalahan Dalam Kegiatan BUMDes?
4. Bagaimana Pembuatan Struktur Pengurus BUMDes Di Desa Bumi Rahayu ?
5. Apakah Sudah Ada Rencana Program Yang Akan Di Jalankan?

6. Apakah Ada Program Prioritas Yang Akan Dijalankan BUMDes ?
7. Apakah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban seluruh Pengurus Sudah Mengetahui ?
8. Bagaimana Kepedulian Masyarakat Terhadap BUMDes ?
9. Berapa Jumlah Dana Yang Diberikan Oleh Desa Dalam Menjalankan BUMDes?
10. Bagaimana Kondisi Internal Pengurus BUMDes ?

MASYARAKAT

1. Apakah Bapak / Ibu Mengetahui Tentang BUMDes ?
2. Bagaimana Partisipasi Bapak / Ibu Dalam Kegiatan BUMDes ?
3. Apakah Bapak / Ibu Mengetahui Semua Program Yang Ada Di BUMDes ?
4. Apakah Bapak / Ibu Hadir Dalam Pembentukan ?
5. Apakah Harapan Bapak / Ibu Terhadap BUMDes Yang Ada Di Desa ?
6. Apakah BUMDes Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Perekonomian Di Desa?
7. Apakah Tawaran Program Yang Sudah Direncanakan BUMDes Sudah Sesuai Dengan Harapan Bapak / Ibu ?
8. Bagaimana Keterlibatan Bapak / Ibu Dalam Pengembangan BUMDes ?
9. Apa Harapan Terbesar Bapak / Ibu Kepada BUMDes ?
10. Apakah Bapak / Ibu Sudah Memahami Bagaimana Pola Yang Akan Di jalankan BUMDes?